

# Usulan Retribusi Alat Berat Disetujui

## DPPKAD Tunggu Teknis Pengarikannya

**SUNGAIRAYA**—Usulan tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Kubu Raya untuk menarik perda retribusi alat berat disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) sedang menggodoknya di tingkat eksekutif.

"Pada dasarnya kita sambut positif usulan DPRD Kubu Raya. Draft Perda retribusi alat berat tengah kita proses dan bahas. Mudah-mudahan 2012 nanti sudah terealisasi," kata Sutrisno, kepala DPPKAD Kubu Raya, kemarin. Menurut dia, perda merupakan payung hukum yang lebih dominan dan tinggi di tingkat pemerintah kabupaten.

Oleh karena itu, ditambahkan dia, penting membuat aturan penarikan retribusi alat berat yang bertujuan meningkatkan PAD Kubu Raya. Apalagi solusi sebelumnya melalui sumbangan pihak ketiga juga sepertinya belum berjalan. "Hanya saja tanpa perda tentunya tidak kuat. Dengan perda akan diatur pengelompokan jenis alat berat yang dimaksud. Dan kedepannya tinggal instansi teknis yang meramu," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa sejak tahun 2010 lalu, memang tidak ada penarikan retribusi alat berat maupun melalui sumber-sumber penerimaan lainnya. Selama ini tidak ada penerimaan dari alat berat. Provinsi, menurut dia, tidak mungkin melakukan penarikan karena itu merupakan aset daerah kabupaten. Kondisi sekarang, lanjutnya, Pemkab Kubu Raya memiliki dua unit alat berat berupa ekskavator sebagai aset daerah. Direncanakan pada tahun 2012 kedepan akan menambah setidaknya dua unit alat berat. Alat-alat ini nangkring dan dikelola instansi teknis seperti Dinas Bina Marga dan Pengairan. "Untuk penggunaannya, di dinas teknis terkait. Kita hanya menerima laporan saja," ujarnya.

Sebelumnya, tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Kubu Raya menerima dan sepakat menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Realisasi APBD 2010 untuk diperdakan. Penyampaian tersebut dilakukan langsung dalam sidang paripurna pandangan akhir (PA) fraksi-fraksi di DPRD, Jumat (21/10) siang. Akan tetapi, beberapa item tetap menjadi sorotan dan kritikan oleh tujuh fraksi, seperti mendesak eksekutif untuk segera menarik retribusi terhadap aset daerah berupa alat berat.

Tujuh fraksi tersebut diantaranya RKNR, Golkar, DKDS, PAN, PPP, PDIP, dan Fraksi Demokrat. Di samping mereka juga mendesak pengelolaan keuan-

gan mesti diperbaiki agar tidak lagi menjadi temuan BPK RI, sehingga predikat keuangan Kubu Raya bisa *disclaimer*. Khusus Fraksi RKNR menyikapi aset daerah berupa alat berat, mereka menilai perlu ditarik retribusi dalam hal sewa-menyewa, sehingga hasilnya dapat menjadi pendapatan daerah. "Aset daerah berupa alat berat harus ditarik retribusi agar hasilnya menjadi pendapatan daerah," kata juru bicara Fraksi RKNR Jauhari Ja'far. Sementara Fraksi PAN meminta Pemkab agar transparan dalam pengelolaan retribusi alat berat itu nantinya. "Hendaknya dapat dikelola secara transparan," kata juru bicara Fraksi PAN Raqib.

Nada serupa juga disampaikan Fraksi PDIP melalui jurubicarannya, M Tohir, yang meminta supaya segera dibuatkan payung hukum untuk sewa menyewa alat berat. "Alat berat seperti ekskavator harus dibuatkan payung hukumnya, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dalam pelaksanaannya," kata dia.

Wakil Bupati Kubu Raya Andreas Muhroti yang hadir pada kesempatan itu menyebutkan bahwa masukan dari fraksi-fraksi tersebut akan ditampung dan ditindaklanjuti ke masing-masing SKPD. "Masukan ini dalam rangka untuk perbaikan, sehingga menjadi bahan evaluasi dan perencanaan yang matang ke depannya," kata Andreas. (den)